



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : Ke-17
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 5 Juli 2023
Waktu : Pukul 15.50 WIB s.d. 18.05 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI
Ketua Rapat : Roberth Rouw (F-P. NASDEM), Wakil Ketua Komisi V DPR RI
Acara :
1. Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2023 sampai bulan Mei 2023;
2. Membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L TA 2024 masing-masing Unit Eselon I.
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
Hadir : A. Anggota DPR RI:
21 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
5 dari 12 orang Anggota
1. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
2. Ir. Sudjadi
3. Sri Rahayu
4. Harvey B. Malaihollo
5. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., MCOMN&MEDIAS
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
2 dari 8 orang Anggota
1. Ir. Ridwan Bae
2. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)
2 dari 7 orang Anggota
1. Ir. Sumail Abdullah
2. Sudewo, S.T., M.T.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
1 dari 6 orang Anggota
 1. Roberth Rouw

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
3 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P.
 2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
 3. H. Dedi Wahidi, S.Pd.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
3 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.
 3. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
1 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
2 dari 4 orang Anggota
 1. H. Boyman Harun, S.H.
 2. Hj. Hanna Gayatri, S.H.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
 1. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.
 2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI (Ir. Arif Toha Tjahjagama, DEA) beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW):

Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Eselon I Kementerian Perhubungan, hari Rabu tanggal 5 Juli 2023.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Saudara Dirjen Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan beserta jajarannya,
Yang terhormat para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan seluruh
Indonesia, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Mengawali rapat ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat dan walafiat.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi V DPR RI, saat ini rapat Komisi V DPR RI telah diikuti oleh (*suara kurang jelas*) dari 55 Anggota dan terdiri dari 9 fraksi sehingga telah memenuhi kuorum. Oleh karena itu, sebagai yang ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah kami membuka rapat pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) rapat Komisi V DPR RI hari ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.50 WIB)

Kami ucapkan terima kasih pada Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan serta para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan seluruh Indonesia yang hadir dalam rapat hari ini. Sebagaimana undangan yang telah disampaikan RDP pada hari ini diagendakan membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 dan rencana alokasi anggaran terhadap fungsi, program dan prioritas Anggaran K/L Tahun Anggaran 2024 masing-masing Unit Eselon I.

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI, dan
Dirjen Perhubungan Laut dan yang kami hormati,

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Rapat Kerja Komisi V RI dengan Menteri Perhubungan pada hari Selasa tanggal 6 Juni tahun 2023 kemarin, telah disepakati beberapa hal, diantaranya pagu indikatif Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 38,077 triliun. Dari alokasi pagu indikatif tersebut alokasi anggaran Dirjen Perhubungan Laut adalah sebesar 9,28 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan antara lain: penyelenggaraan angkutan tol laut, pengembangan fasilitas pelabuhan, pengembangan sistim Inapornet serta pembangunan dan (*suara kurang jelas*) rehabilitasi sarana bantu navigasi dan telekomunikasi pelayaran. Sejalan dengan itu dalam kesempatan ini kami tekankan kembali agar dalam proses penyusunan pagu anggaran tahun 2024, agar tiap-tiap unit organisasi Eselon I dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI, yang disampaikan dalam seluruh rangkaian rapat kerja dan rapat-rapat lainnya.

Selanjutnya terdapat sejumlah permasalahan strategis yang perlu mendapat perhatian dari Dirjen Perhubungan Laut antara lain tentang:

1. strategi optimilisasi daya serap anggaran untuk program strategis nasional pada Dirjen Perhubungan Laut berdasarkan RPJMN 2020-2024 Kementerian Perhubungan yang perlu mendapat penjelasan;
2. Dirjen Perhubungan Laut agar tetap menjaga kebutuhan-kebutuhan standar pelayanan untuk menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian dan peraturan terhadap aspek keselamatan lainnya, baik di (*suara kurang jelas*);
3. strategi pengembangan pelabuhan di kawasan prioritas terkait IKN, kawasan ekonomi khusus serta di wilayah perbatasan, terisolir dan rawan bencana;
4. meningkatkan kebijakan pengelolaan potensi penerimaan dan pemanfaatan PNBPN di sektor laut.

Saudara-Saudara yang kami hormati,

Demikianlah pengantar dari kami.

Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan penjelasan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 sampai Bulan Mei 2023 dan membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran K/L Tahun Anggaran 2024 masing-masing Unit Eselon I.

Untuk itu kami persilakan.

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Ir. ARIF TOHA TJAHJAGAMA, DEA):**

Yang terhormat Bapak (*suara terputus-putus*)

(*suara terputus-putus*) kemudian Kepala Kantor UPP Kelas 2 Nusa Penida (*suara terputus-putus*) dengan Bapak-Ibu (*suara terputus-putus*)

(*suara terputus-putus*) berkoordinasi dan meminta arahan pada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di mana menjadi Dapil dari pada komisi, Komisi V.

Pada kesempatan hari ini terdapat dua fokus, ini ada 47 UPT, Pak. Total UPT kami adalah 296 UPT, jadi kalau diundang semua *ndak* muat ruangnya, Pak. Oleh karena itu, hanya sebagian yang diundang.

Pada kesempatan hari ini terdapat dua fokus agenda pembahasan yang akan kami sampaikan: yang pertama adalah evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 dan rencana alokasi anggaran menurut fungsi program dan prioritas anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2024.

Pertama-tama, perlu kami sampaikan berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2023 di mana telah kita ketahui bersama bahwa alokasi anggaran Dirjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9,4 triliun dengan proporsi belanja pegawai Rp1,84 triliun, belanja barang Rp4,15 triliun dan belanja modal sebesar Rp3,4 triliun, kemudian posisi sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 penyerapan anggaran Dirjen Perhubungan Laut sebesar 34,7% dari target prognosa sebesar 30,74% atau deviasi positif sebesar 3,96%.

Adapun realisasi sampai dengan akhir bulan Juni sebesar 41,44% atau deviasi positif sebesar 3,92% dari target sebesar 37,52%.

Selanjutnya, terkait dengan target penerimaan PNBPN, prosentase capaian sampai dengan akhir bulan Juni sebesar 56,32%, atau melebihi 7,4% dari target sebesar 48,92%, pun demikian dengan target prognosa sebesar 50,06% juga telah melampaui sebesar 6,26%.

Kemudian terkait dengan kegiatan kontraktual dapat kami sampaikan bahwa, kegiatan dan yang telah melakukan kontrak sebesar 75,77%, proses lelang sebesar 5,84% dan belum lelang ada 18,38%. Kemudian kegiatan yang belum melakukan pelelangan disebabkan antara lain terdapat kegiatan yang menunggu surat izin impor, yang saat ini telah mengajukan surat permohonan izin persetujuan penggunaan barang non Produk Dalam Negeri atau PDN, kemudian kegiatan *docking* kapal yang masih menunggu jadwal *docking*, kegiatan yang masih menunggu penyelesaian studi perencanaan, kegiatan yang sedang dalam proses buka blokir, serta kegiatan yang terkena blokir *automatic adjustment*.

Para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami muliakan,

Berkaitan dengan kebutuhan anggaran Tahun Anggaran 2023 dapat kami sampaikan bahwa terdapat tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,03 triliun, di mana dari kebutuhan tersebut telah teralokasi sebesar Rp331 miliar, kemudian, sehingga masih terdapat sisa kebutuhan sebesar Rp625 miliar. Pemenuhan sisa kebutuhan anggaran tersebut ditargetkan dapat dipenuhi melalui pemanfaatan sisa anggaran, efisiensi, realokasi, kegiatan blokir, dan realokasi *automatic adjustment*, serta tambahan alokasi PNBPN sebagaimana perubahan persetujuan izin penggunaan menjadi 67%. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini kami memohon dukungan dari Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI agar kiranya Dirjen Perhubungan Laut mendapatkan alokasi tambahan APBN dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran yang belum teralokasikan pada Tahun Anggaran 2023.

Perlu kami sampaikan juga berkaitan dengan kegiatan Padat Karya bahwa telah terealisasi kegiatan pendukung Padat Karya sebesar Rp461 miliar dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.078 orang dan total upah yang telah dibayarkan sebesar Rp6,3 miliar. Adapun target sampai dengan akhir tahun 2023 anggaran, anggaran pendukung Padat Karya dapat terealisasi

sebesar Rp1,02 triliun dengan target penyerapan tenaga kerja sebesar 9.369 orang dan total upah yang tersalurkan sebesar Rp14,39 miliar.

Pada kesempatan ini itu kembali saya ingatkan pada teman-teman KPA, KUPT, untuk selalu berkomunikasi dengan Bapak-Ibu Anggota Komisi V di Dapilnya masing-masing.

Selanjutnya, dapat kami sampaikan terkait dengan program atau kegiatan prioritas nasional Tahun Anggaran 2023 tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti dalam tayangan *slide* meliputi, pembangunan fasilitas sarana bantu navigasi pelayaran, pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan, pembangunan kapal patroli, penyelenggaraan angkutan keperintisan penumpang, tol laut dan ternak.

Selanjutnya terkait dengan progres program atau kegiatan pada masing-masing bidang dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Satu, bidang lalu lintas dan angkutan laut penyelenggaraan pelayanan angkutan laut perintis, penugasan dan swasta, saat ini telah terealisasi sebesar 50,39%, kemudian pelayanan angkutan kapal ternak sebesar 44,25% dan penyelenggaraan pelayanan angkutan barang tol laut sebesar 51,66%, realisasi penumpang angkutan perintis sebanyak 372.042 orang dengan muatan barang sebanyak 50,4000 ton meter kubik dengan muatan tol laut sebanyak 14.090 *teus container*.

Kemudian kami sampaikan juga sebaran 39 *track* tol laut dengan 10 pelabuhan pangkal dan 115 pelabuhan singgah sebagaimana dalam tayangan *slide*. Jaringan trayek perintis sebanyak 116 trayek dengan 42 pelabuhan pangkal dan 562 pelabuhan singgah jaringan trayek kapal angkutan laut. Khusus ternak sebanyak 6 trayek dengan 8 pelabuhan muat dan 6 pelabuhan bongkar, jaringan trayek PSO PT PelnI sebanyak 26 trayek dengan 8 pelabuhan pangkal, dan 71 pelabuhan singgah, serta jaringan trayek kapal rede sebanyak 16 trayek dengan 14 pelabuhan pangkal dan 4 pelabuhan singgah.

Yang kedua, bidang kepelabuhan, pembangunan Pelabuhan Patimban terealisasi sebesar rata-rata 58,8%, rehabilitasi dan rekonstruksi Pelabuhan Wani, Donggala dan Pantoloan dengan realisasi sebesar 44,78%, pengembangan fasilitas pelabuhan 21 lokasi dengan realisasi sebesar 42,2%, *replacement* fasilitas pelabuhan 2 lokasi dengan realisasi sebesar 60,1%, rehabilitasi fasilitas pelabuhan 12 lokasi dengan realisasi sebesar 40,9%, pembangunan dan rehab gedung kantor pelayanan 24 lokasi dengan realisasi sebesar 44,3%, dan pembangunan fasilitas pendukung 35 alokasi dengan realisasi sebesar 60,9%.

Kemudian bidang perkapalan dan kelautan. Pengembangan perangkat sistem informasi perkapalan dan kelautan realisasi sebesar 65% dan pengembangan aplikasi e-Pas Kecil sebesar 80%. Di bidang KPLP, pembangunan kapal patroli kelas 3 dengan realisasi sebesar 32,4%,

pembangunan kapal patroli kelas 4 MYC sebesar 79,9%, dan pembangunan kapal patroli kelas 4 *single years contract* sebesar 5,52%.

Dapat kami sampaikan juga terkait dengan sebaran proyek strategis nasional sebagaimana dalam tayangan *slide* dan detail dokumentasi telah kami sajikan dalam lampiran *handout* bahan paparan yang telah kami sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian yang terhormat.

Selanjutnya, kami sampaikan progres kegiatan strategis sebagai hasil tindak lanjut pembahasan bersama Komisi V DPR RI seperti dalam agenda Raker, RDP, dan Kunker sampai dengan bulan Mei telah terealisasi sebesar 35% dengan rincian dapat kita lihat bersama dalam *slide* berikut.

Para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,

Kita beranjak pada agenda kedua yang terkait dengan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2024.

Sebagai pengantar, kami sampaikan sepintas terkait dengan rencana kerja pemerintah tahun 2024 dengan tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dirjen Perhubungan Laut mendukung pada arah kebijakan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara yaitu perwujudan angkutan laut yang murah, mudah, simpel, dan kompetitif. Peningkatan konektivitas transformasi, transportasi laut, penyediaan infrastruktur pelabuhan laut yang berdaya saing, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim, peningkatan efektivitas penegakan hukum di laut serta peningkatan integrasi dalam pengelolaan organisasi.

Selanjutnya, terkait dengan pengalokasian anggaran strategis, penganggaran Dirjen Perhubungan Laut 2024, secara garis besar berfokus pada ketepatan perhitungan alokasi belanja pegawai sesuai dengan jumlah eksisting pegawai dan indikasi perubahan pada tahun 2024.

Yang kedua adalah pemenuhan alokasi tunjangan kinerja, 13 dan 14 dengan mengikuti dinamika kebijakan penganggaran di tingkat Kementerian Keuangan.

Yang ketiga adalah pengalokasian belanja subsidi yaitu untuk keperintisan tol laut, kapal ternak, dan rede secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan pemenuhan target trayek, frekuensi dan kapasitas penyerapan anggaran dengan *baseline* tahun sebelumnya, serta kondisi perubahan lingkungan strategis salah satunya adalah kenaikan harga BBM.

Yang keempat adalah pengalokasian belanja perjalanan dinas, paket *meeting*, honor, belanja barang operasional dan belanja barang non operasional lainnya dengan tetap mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Pemenuhan kegiatan MYC sampai tahun 2024, kemudian pengalokasian pada lokasi pendukung kawasan strategis dan prioritas nasional.

Yang ketujuh adalah indikasi kegiatan baru yang telah memenuhi *readiness criteria* atau kesiapan dokumen perencanaan melalui pembiayaan SBSN. *Mapping* kesiapan kegiatan yang akan dibiayai oleh pinjaman luar negeri, kemudian juga pengalokasian kegiatan Padat Karya dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat Pandemi Covid-19. Mitigasi pembiayaan infrastruktur pelabuhan yang terdampak P3D, kemudian *mapping* kebutuhan pembangunan gedung kantor dan kegiatan IT serta pengadaan kendaraan dinas untuk mendapatkan izin prinsip dari Presiden dan K/L terkait.

Para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,

Dapat kami sampaikan bahwa pagu kebutuhan Dirjen Perhubungan Laut yaitu sebesar Rp14,77 triliun, selanjutnya terkait dengan pagu indikatif alokasi Dirjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9,28 triliun, di mana hal tersebut sejalan dengan dan sesuai dengan surat bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait Postur Pagu Indikatif Kementerian Lembaga Tahun Anggaran 2024 serta didetailkan pengalokasiannya per unit Eselon I Kementerian Perhubungan melalui surat dan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, terdapat *gap* sebesar 5,4 miliar atau 37% antara pagu kebutuhan dan pagu indikatif Dirjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2024.

Adapun rincian postur pagu indikatif Dirjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2024 meliputi: belanja pegawai sebesar Rp1,76 triliun, belanja barang sebesar Rp4,96 triliun, berupa belanja barang operasional sebesar Rp1,5 triliun, penyelenggaraan pelayanan angkutan laut perintis, tol laut ternak, dan rede sebesar Rp1,87 triliun, kegiatan perawatan aset teknis dan penunjang teknis bidang kepelabuhanan, lalu lintas, dan angkutan laut, kenavigasian, KPLP dan perkapalan kepelautan sebesar 1,12 triliun, kegiatan belanja barang non operasional lainnya seperti dukungan manajemen teknis dan pendukung operasional sebesar Rp458 miliar.

Yang ketiga adalah belanja modal sebesar Rp2,56 triliun meliputi: pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, fasilitas pokok pelabuhan sebesar Rp1,74 triliun. Pembangunan pengembangan dan rehabilitasi fasilitas pendukung pelabuhan sebesar 237 miliar, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas keselamatan pelayaran dalam ini ada SBNP/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, ada telekomunikasi pelayaran sebesar Rp260 miliar, pembangunan kapal patroli senilai 372 miliar, *docking* kapal perintis, ternak, tol laut dan kapal negara 139 miliar, pembangunan fasilitas penunjang KPLP dan perkapalan kepelautan 21,7 miliar, pengadaan perangkat dan pengembangan sistem informasi Rp24,3 miliar, pembangunan fasilitas pendukung BLU Rp13,4 miliar.

Para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Selanjutnya, komposisi pagu indikatif Dirjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2024 berdasarkan sumber dana meliputi rupiah murni sebesar Rp5,6 triliun, PNPB sebesar Rp2,001 triliun, Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN sebesar Rp959 miliar, pinjaman luar negeri sebesar Rp676 miliar, dan badan layanan umum sebesar Rp13 miliar.

Dapat kami sampaikan alokasi penggunaan PNPB sebesar Rp2 triliun tersebut lebih kecil dari besaran izin penggunaan penerimaan PNPB yang telah diberikan yaitu sebesar 67% atau Rp2,93 triliun dari target penerimaan PNPB sebesar Rp4,36 triliun pada tahun 2024, sehingga terdapat *gap* sebesar Rp936 miliar yang belum teralokasikan.

Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini yang baik ini kami kembali memohon dukungan dari Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI, agar kiranya Dirjen Perhubungan Laut dapat alokasi tambahan porsi PNPB Tahun Anggaran 2024.

Terkait porsi postur per bidang, dapat kita lihat bersama dalam tayangan *slide* berikut ini.

Para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,

Selanjutnya, berikut kami sampaikan program-program prioritas Dirjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Pertama, penyelenggaraan subsidi berupa angkutan tol laut, angkutan laut perintis dan angkutan laut kapal ternak dengan total sebanyak 158 trayek, penyelenggaraan angkutan kapal rede sebanyak 16 unit, pembangunan pelabuhan sebanyak 42 lokasi yang meliputi: pembangunan fasilitas pelabuhan di 3 lokasi, pengembangan fasilitas pelabuhan di 13 lokasi, *replacement* fasilitas pelabuhan di 3 lokasi, rehabilitasi fasilitas pelabuhan di 23 lokasi. Pembangunan dan rehabilitasi sarana bantu navigasi pelayaran meliputi: menara suar, rambu suar, dan pelampung suar sebanyak 30 kegiatan, pembangunan dan rehabilitasi telekomunikasi pelayaran sebanyak 3 kegiatan, pengembangan sistem Inaportnet dan pengembangan sistem pelayanan terpadu atau Simpadu.

Selanjutnya, Dirjen Perhubungan Laut dalam pengalokasian anggaran Tahun Anggaran 2024 juga memprioritaskan dukungan pada program nasional berupa *major project* seperti dukungan pada kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan KEK serta penyelenggaraan transportasi laut yang berbasis Indonesia sentris. Adapun sebaran kegiatan prioritas nasional dapat kita lihat bersama dalam tayangan *slide* di antaranya meliputi: pembangunan Pelabuhan Simalepet, Pelabuhan Sungai Guntung, Pelabuhan Ratu, Pelabuhan Wini, Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Lerokis, Pelabuhan Kaimana, Pelabuhan Kaledupa, Pelabuhan Luwuk, Pelabuhan Kilo, Pelabuhan Anggrek dan sebagainya.

Berkaitan dengan program Padat Karya tahun 2024, Dirjen Perhubungan Laut menetapkan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 9.214 orang dengan nilai upah mencapai 16,3 miliar dan pagu program kegiatan pendukung kegiatan Padat Karya sebesar Rp1,37 triliun. Sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman KUART untuk selalu dalam program Padat Karya ini berkomunikasi dengan Bapak-Ibu yang mulia Anggota Komisi V.

Selain itu, kami sampaikan juga terkait kegiatan yang dibiayai melalui SBSN pagu yang dialokasikan sebesar 959 miliar, dengan porsi bidang kepelabuhanan sebesar 700,7 miliar dan kenavigasian sebesar 258,3 miliar dengan sebaran lokasi kegiatan pada dapat kita lihat bersama dalam tayangan *slide*.

Sedangkan terkait rencana penarikan pinjaman dan hibah luar negeri sebesar 676,1 miliar dengan rincian seperti kita lihat bersama dalam *slide* paparan.

Selanjutnya dapat kami sampaikan terkait kewajiban penyelenggaraan angkutan laut pada tahun 2024 terdapat total sebaran 117 trayek perintis dengan 42 pelabuhan pangkal, 35 trayek tol Laut dan 6 trayek ternak sebagaimana dapat kita lihat dalam tayangan *slide* berikut ini.

Adapun sebaran kegiatan strategis pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan pada Tahun Anggaran 2024 dengan total anggaran sebesar Rp1,7 triliun, sebagaimana dapat kita lihat bersama dalam tayangan *slide*, serta sebaran lokasi infrastruktur pendukung keselamatan dan keamanan pelayaran dengan total anggaran sebesar Rp638 miliar dapat kita lihat dalam tayangan *slide*.

Selanjutnya, terkait dengan detail dan rincian kegiatan pada pagu indikatif Dirjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2024 dan tanggapan atas pertanyaan pada rangkaian rapat kerja yang telah diagendakan sebelumnya kami sajikan pada lampiran *handout* bahan paparan yang kami sudah kami sampaikan pada Bapak-Ibu sekalian.

Para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami muliakan,

Demikian paparan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan rapat dengar pendapat terkait pagu indikatif Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, guna optimalisasi penyelenggaraan dan pelayanan transportasi laut ke depan, kami selaku penyelenggara subsektor Perhubungan Laut mengharapkan dukungan dan masukan dari para Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat guna upaya perbaikan dan peningkatan kinerja transportasi laut di masa yang akan datang. Untuk hal ini, kembali kami minta teman-teman Kepala UPT selaku KPA selalu berkomunikasi dengan Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi V, agar program-program yang kita tetapkan di 2024 maupun di 2023 ini dapat sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih, Saudara Dirjen atas paparan yang telah disampaikan.

Sebelum saya masuk ke di kesempatan kepada para Anggota, ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan Saudara Dirjen melihat realisasi penyerapan anggaran Dirjen Perhubungan Laut sampai Juni 2023 sebesar 41,44% dari total anggaran 9,40 triliun dan program pendukung Padat Karya Dirjen Perhubungan Laut 2023 sebesar 1,023 triliun, itu sebesar 45,04%. Dibandingkan dengan 2022 ini peningkatan ya, Pak, ya, ini kami berikan apresiasi, karena peningkatan yang baik.

Selanjutnya, realisasi penyerapan PNBK Dirjen Perhubungan Laut sampai dengan Juni 2023 sebesar 2,47 triliun, itu kurang lebih sebesar 56,32% dari target sebesar 4,40 triliun, saya kira ini peningkatan yang cukup baik. Alokasi anggaran untuk Dirjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2024 sebesar 9,28 triliun ya, dibandingkan tahun 2023 turun ya. Oke, ya mudah-mudahan nanti bisa, kita harapkan ada peningkatan kembali untuk bisa, ya minimal dikembalikan seperti semula. Dari alokasi pagu indikatif tersebut akan digunakan untuk yang tadi kita sudah sampaikan.

Yang berikut, saya ingin ada isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian yaitu, yang pertama perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan tol laut guna mengoptimalkan konektivitas logistik sampai ke daerah-daerah pedalaman, terpencil, dan pulau terluar dalam rangka pemerataan dan pembangunan ekonomi antar wilayah.

Yang kedua, penyelesaian pembangunan pelabuhan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan, pembangunan dan rehabilitasi sarana bantu navigasi pelayaran yaitu antara lain menara suar, rambu suar, dan pelampung suar dan pembangunan kapal patroli.

Yang ketiga, terkait dengan alur laut sekitar pelabuhan yang mengalami pendangkalan, agar mendapatkan perhatian Kementerian Perhubungan untuk memperlancar lalu lintas transportasi laut.

Yang keempat, Komisi V DPR RI menganggap perlu mendapat penjelasan terkait dukungan sarana dan prasarana logistik di sektor transportasi laut dalam rangka pembangunan IKN, ini mohon penjelasan nanti, Pak.

Saya kira itu yang menjadi perhatian untuk Saudara Dirjen, ya demikian.

Selanjutnya saya mohon pertanyaan dan tanggapan dari para Anggota yang sudah terdaftar di sini. Yang pertama, Saudara Anwar Hafid dari Fraksi Partai Demokrat, bersedia Saudara Irmawan, silakan Pak Anwar.

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore.

Salam sejahtera buat kita sekalian.

Yang saya hormati Pimpinan dan sahabat Komisi V yang saya muliakan, Pak Dirjen dan seluruh jajaran,

Ada tiga hal yang ingin saya konfirmasi, Pak, sekaligus pendalaman. Yang pertama tadi terkait dengan efektivitas dari pelaksanaan program tol laut. Dulu ketika pertama kali Presiden menyampaikan program tol laut ini, salah satu yang menjadi harapan dan kegembiraan masyarakat daerah-daerah yang terluar, tertinggal ya, itu adalah mereka bisa menikmati harga, harga sembilan bahan pokok yang sama di kota dengan daerah-daerah yang terluar. Namun dalam prakteknya, dalam kenyataannya tidak seperti, tidak seindah yang menjadi harapan itu. Saya hanya ingin, apakah ini ada evaluasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian, teristimewa dari Dirjen Perhubungan Laut terkait dengan efektivitas pelaksanaan tol laut ini. Karena saya lihat programnya begitu masif, mudah-mudahnya di akhir Pemerintahan Bapak Presiden Jokowi ini harapan masyarakat itu bisa terealisasi dengan baik.

Yang kedua, terkait dengan dukungan ya logistik, distribusi barang dan bahan dalam rangka percepatan pembangunan IKN. Saya sampaikan Pak Dirjen, ini aspirasi dari teman-teman, dari Palu, Sulawesi Tengah, karena bahan baku pasir, batu dan sebagainya itu sebagian besar dari, berasal dari Kota Palu. Beberapa waktu lalu sempat didatangi oleh tim dari kementerian, dari otoritas IKN, salah satu masalah adalah kurang lancarnya pasokan material yang akan digunakan di pembangunan IKN tersebut. Kemarin setelah saya diskusi dengan mereka, salah satu itu masalahnya Pak Dirjen itu adalah susahnya pelabuhan di sana untuk bongkar muat itu. Jadi, saya sarankan pada kesempatan ini, aspirasi ini, untuk segera ditindaklanjuti pelabuhan bongkar muat bahan material yang ada di IKN itu diperbaiki, sehingga *supply* barang-barang, bahan-bahan logistik, material untuk kepentingan pembangunan IKN ini bisa lancar ya.

Yang ketiga, Pak Dirjen kita kemarin ini sempat dihebohkan dengan salah satu temuan pemerintah termasuk yaitu adanya ekspor nikel, *ore* nikel ya sampai lima juta ton kalau tidak salah. Ini saya tanya karena semua ini kan Tersus/terminal khusus, tidak ada barang *ore* nikel itu yang keluar tidak melalui terminal khusus. Pada kesempatan ini mohon dikonfirmasi, Pak, apa benar ini dan kira-kira modusnya bisa terjadi itu seperti apa. Tidak mungkin penyelundupan ini penyelundupan yang kecil, Pak, ini menggunakan vessel-

vessel yang sangat besar dan ini pelabuhannya jelas. Di Indonesia ini ada beberapa daerah sumber nikel ini, Sulawesi, Halmahera ya. Saya kira tidak ada yang gelap ini, *nih* barang terang benderang, dan mohon dikonfirmasi apakah kementerian dalam hal yang memiliki Dirjen Perhubungan Laut yang memiliki kewenangan dalam hal Tersus itu mengetahui atau tidak.

Yang keempat, saya juga ini menyarankan Pak, tadi lagi mengulangi apa disampaikan oleh Pimpinan ketika tadi rapat dengan Dirjen Perhubungan Darat, kala kita melihat program yang disampaikan untuk 2024, kita berharap, Pak, ini bukan program yang harga mati, mudah-mudahan ini masih bisa kita diskusikan nanti dalam rapat-rapat selanjutnya sehingga masih banyak aspirasi-aspirasi yang kami dapatkan di lapangan yang lebih penting dan mendesak untuk dilaksanakan 2024.

Saya kira itu saja saran saya, Pimpinan.

Terima kasih.

*Wallahul musta'an,
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Anwar.
Lanjut, Pak Irmawan, siap-siap Pak Ruslan.

F-PKB (H. IRMAWAN, S.SOS., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V,
Yang kami hormati Bapak Dirjen Kelautan beserta Direktur, dan
Bapak-Bapak yang hadir pada kesempatan ini,**

Pertama, saya ingin sampaikan kepada Pak Dirjen Kelautan bahwa dari sekian banyak anggaran untuk yang kita alokasikan untuk Dirjen Kelautan, saya melihat hanya sedikit sekali Aceh mendapat bagian dari anggaran Dirjen Kelautan ini, Pak. Kalau tidak salah saya hanya ada pembangunan kantor navigasi, hanya itu saya pikir, Pak. Padahal di Aceh itu juga ada beberapa pelabuhan yang sesungguhnya perlu kita perhatikan agar bisa difungsikan secara maksimal kegunaannya, terutama ada Pelabuhan Krueng Raya, Pak. Krueng Raya ini adalah dulu pernah menjadi kebanggaan masyarakat Aceh karena ini adalah menjadi pusat perekonomian pada saat itu, tetapi hari ini perlu banyak apa namanya itu, banyak yang harus kita perbaiki, yang harus kita renovasi sehingga kegunaan fungsi daripada Dermaga Malahayati ini bisa berfungsi secara maksimal. Jadi, saya berharap kepada Pak Dirjen Kelautan agar di tahun 2024 ini dapat mengalokasikan sehingga Aceh juga merasa

berkeadilan di Dirjen Kelautan ini, paling tidak ada beberapa pelabuhan lah yang ingin kita perbaiki yang ada di Aceh, itu satu.

Kemudian yang kedua, Pak, di daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, ada daerah Teluk Surin namanya, dan di situ sangat potensial kita bangun sebuah pelabuhan yang bisa menjadi tempat mobilisasi CPO terutama, Pak, karena hari ini daerah Abdya dan dan Pantai Barat Selatan itu menjadi penghasil sawit yang sangat banyak sekali, mobilisasinya ke Medan selama ini adalah memakai tangki, memakai truk itu sehingga aktivitas truk pengangkut CPO ini sangat mengganggu arus lalu lintas di Pantai Barat Selatan dan juga truk-truk ini juga banyak berkontribusi terhadap kerusakan jalan nasional yang ada di Barat Selatan itu. Jadi oleh karena itu, mungkin ini untuk ke depan bisa menjadi bahan pemikiran kita, kita butuh ada dermaga, paling tidak bisa mengangkat CPO yang dari Barat Selatan ke Medan sehingga tidak lagi kita melakukan menggunakan truk-truk yang selama ini banyak merusak dari pada jalan-jalan yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR.

Kemudian yang terakhir barangkali, Pak, terkait dengan Padat Karya. Kami tidak tahu ini, mungkin saya yang yang tidak *update* ini, kalau di Dirjen Kelautan juga Padat Karya, kegiatan Padat Karya ada. Apakah dari tahun 2023 sudah ada memang, Pak? sudah ada ya? tahun 2024 ini saya lihat ada sekitar satu koma sekian T, Pak, ya. Jadi tolong penjelasannya Padat Karya ini kira-kira apa-apa saja kegiatannya, Pak, yang barangkali bisa di-*share* ke kita teman-teman Komisi V untuk membantu konstituen yang ada di daerah.

Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Irmawan.

Lanjut Pak Ruslan, silakan.

F-PKB (H. RUSLAN M. DAUD, S.E., M.A.P.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan dan seluruh teman-teman Anggota Komisi V yang kami banggakan, Bapak Dirjen dan seluruh para jajaran yang hadir, teristimewa Kepala-Kepala Unit Penyelenggara, Unit 1 dan Unit 2 yang hadir di seluruh Indonesia pada hari ini, terutama mungkin Aceh. Aceh ada hadir *enggak*? Ada ya? moga-moga saling kenal kita, *InsyAllah*.

Pak Dirjen yang kami banggakan, ini menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Ir tadi. Kami sangat luar biasa ya, ini *kok* Provinsi Aceh ini menjadi penonton, di antara sekian triliun uang negara yang Bapak kelolakan, ini kami sedikit pun, hanya sedikit saja yang dapat apa yang kami rasakan, apa yang kami tontonkan pada hari ini disaat Bapak katakan tadi. *Nah*, perlu diketahui Pak Dirjen, Provinsi Aceh ini bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan berpendudukan hampir 6 juta. *Nah*, ekonomi kami seperti yang kita tahu semua, Aceh adalah memang termiskin di Sumatera, termiskin di Sumatera, kenapa sih *enggak* ada terpikir negara hadir memproduksi, mem-*follow up*, membuat satu terobosan baru, apa yang saya dengarkan tadi, apa yang disebutkan, apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden kita yaitu tol laut yang bisa dirasakan manfaat di seluruh pelosok tanah air. Contoh *nih* Aceh, coba bayangkan Aceh harga, penghasilan yang dihasilkan oleh masyarakat petani yang kami di Aceh ini, ini memang tidak bersahabat, Pak Dirjen, dikarenakan *cost* angkut ini yang sangat sungguh memberatkan. Tetapi kalau memang ini tol laut hadir, ada Krueng Geukueh, ada Pelabuhan Malahayati, yang bisa dimainkan, tentunya bisa memangkas seluruh *cost* yang timbul yang kira-kira mahal, yang tidak cocok dengan masyarakat. Maka sekali lagi Pak Dirjen tolong hadir, kita ke Aceh untuk membantu masyarakat dalam seluruh aspek, terutama adalah ini di segi yang menyangkut hasil-hasil alam yang ada di Aceh supaya pelabuhan bisa hadir di Aceh yang memang layak, yang bisa dibawa langsung, apakah keluar negeri ataupun di dalam negeri secara menyeluruh dari Aceh, baik ke Medan, baik ke Pulau Jawa, dan seterusnya-seterusnya supaya harga bisa stabil, harga bisa bersaing dengan provinsi-provinsi lainnya.

Ini kalau memang *enggak* kita perhatikan, kita mainkan dengan angkutan laut, ini sungguh Aceh tidak akan pernah yang namanya label termiskin di Sumatera, *enggak* pernah dicabut, kalau memang Bapak Dirjen kita ini *enggak* hadir untuk memperbaiki keadaan di segi pengangkutan, itu Pak Dirjen.

Nah, yang kedua, saya aneh juga ini Pak Dirjen, kita ada yang namanya Padat Karya, tetapi kami hanya mendengar, wujudnya *gimana*, pelaksanaannya *gimana*, dengan siapa, dan untuk apa, kami tidak tahu. Apakah provinsi lain dapat merasakan? kami pun tidak tahu. *Nah*, mohon untuk ke depan Pak Dirjen di tahun 2024, kami jangan disajikan data, tetapi tolonglah sajikan fakta kami di lapangan yang bisa kira-kira kami manfaatkan untuk masyarakat kami yang ada di Provinsi Aceh.

Itu harapan kami, Pak Dirjen. Moga-moga hari ini adalah ini hari yang pertama, ini mungkin data salah yang Bapak Dirjen sajikan. Tetapi dengan kehadiran kami pada hari ini, dengan kita bahas pada hari ini, ini tentunya ada perbedaan untuk ke depan, Pak Ketua. Sebab kita setiap, selalu RDP, kita hanya adalah mendengar, bukannya membahas, mendengar. Kalau kita membahas ada *slot* dikasih ke kami, ada kolom dikasih ke kami, sehingga kami bisa isi kolom tersebut. Tetapi kalau kami datang mendengar, melihat, selepas itu adalah disajikan keputusharapan, keputusharapan, keputusharapan, apa yang rapat? hasilnya duduk rapat- rapat saja, bukannya menghasilkan *output*

yang bisa bermanfaat untuk masyarakat terutama adalah tempat-tempat kami yang dipilih, yang mewakili masyarakat kami.

Sekian dan terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik.

Lanjut, Ibu Cen Sui Lan.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Komisi V,
Yang saya hormati Pak Dirjen dan jajarannya,**

Pak Dirjen, saya melihat pemaparan untuk tahun 2024, di situ ada pengembangan kantor ya untuk wilayah kerja Sei Lampa Natuna. Saya, Raker terakhir dengan Pak Menteri memohon agar wilayah kerja Natuna dan Anambas itu dipisah, karena dengan jarak yang saat ini cukup jauh, aktivitas itu sangat terganggu. Jadi bukan peningkatan kantornya, tapi kebijakan untuk pemisahan wilayah kerja. Jadi, mohon disetujui karena ini kebijakan ya, jadi mohon disetujui karena itu permintaan Pak Bupati juga, ya melihat biaya-biaya dengan bergabungnya kedua wilayah kerja itu cukup berat bagi masyarakat. Jadi, mungkin bisa menjadi perhatian dan saya lihat banyak sekali program-program yang saat ini saya juga *enggak* bisa berkomentar, karena terlalu, belum pernah saya sampaikan.

Juga, Pak Dirjen, tahun 2023 kan ada Padat Karya, 2022 saya pernah diundang ada undangan dari KSOP, 2023 terakhir saya tanyakan malah *enggak* ada, dan saya lihat muncul lagi 2024 ada program Padat Karya. Jadi, mohon ke depan apakah program Padat Karya *tuh* kalau memang ada, kita-kita ini diundang dan dilibatkan, jangan yang seperti kita hanya penonton yang tidak tahu apa-apa.

Mungkin itu aja Pak Dirjen dari saya, terima kasih. Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Selanjutnya Pak Fadholi, siap-siap Pak Fauzi.

F-P. NASDEM (Drs. FADHOLI, M.Ikom):

Baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan, dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati, Pak Dirjen Laut yang saya hormati, luar biasa semakin tambah muda, Pak, dan seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini,

Beberapa hal, saya hanya akan menyampaikan yang kaitannya dengan wilayah Jawa Tengah, karena di setiap wilayah ini sudah ada perwakilan dari Komisi V, saya pikir beliau-beliau ini sangat *concern* pada wilayahnya. Terkait, kita bicara masalah Pelabuhan Tanjung Mas, Pak ya, ya jadi kalau dari namanya aja harusnya kan Tanjung Mas itu lebih tinggi daripada Tanjung Perak, Pak, tetapi ternyata kualitasnya itu masih di bawah Tanjung Perak, *gitu loh. Nah*, ini, ini mesti menjadi PR Pak Dirjen ini, agar emasnya itu betul-betul emas murni kan *gitu*. Jadi kalau *enggak* bisa di atas Tanjung Perak, Pak, *ndak* usah dikasih nama Tanjung Mas, Pak, apa Tanjung Tembaga atau gimana *gitu*.

Melihat potensi bahwa Pelabuhan Tanjung Mas ini sebetulnya punya potensi yang sangat luar biasa, Jawa Tengah ini wilayahnya tidak jauh berbeda dengan wilayah di Jawa Timur, Pak, akan tetapi masih banyak sekali para masyarakat dan terutama distribusi barang dan jasa ini lebih banyak menggunakan di Pelabuhan Tanjung Perak. *Nah*, karena beberapa hal yang kita lihat, maka ini perlu ada koordinasi secara menyeluruh termasuk dengan Pelindo, karena kalau kita lihat bahwa operasional kegiatan Tanjung Mas ini, dari sisi keadaannya ini aja memang di situ memang rawan rob, Pak. *Nah*, ada beberapa titik yang sangat rawan, kan di wilayah situ cukup bagus, tetapi ada titik yang memang rawan, maka ketika kemudian itu jebol, ini yang disalahkan selalu aja Tanjung Mas, Pak, padahal itu mungkin di kanan kiri Tanjung Mas, satu, maka perlu ada satu koordinasi bersama dengan Pelindo juga.

Dan yang kedua, ini saya melihat bahwa kami pernah mengadakan kunjungan spesifik ke wilayah KSOP Tanjung Mas, Pak, Semarang itu. Jadi itu tanggulnya ini, lah itu kan ada di kawasan Pelindo itu, jadi bukan kantor Bapak kan itu. Itu kan masih ada di kawasan Pelindo. Sekarang di kawasan Pelindo dan kemudian saya lihat kalau apa namanya, tanggulnya sedikit itu kalau ada apa, nahkoda yang ngantuk itu, natap ini pasti jebol itu, mesti kena itu, kan hanya, *ndak* ada 1 meter itu pembatas laut itu, yang di situ. Maka ada *enggak* satu niatan dimulai dari niatan dulu saja, untuk bisa menyediakan kantor yang biar KSOP itu bisa bekerja secara maksimal. Kalau niatannya *enggak* ada ya tidak akan sampai *gitu loh*. Saya pertama tanya dulu, ada *enggak* niatannya itu. Kalau kemudian ada niatan, kapan? kalau itu sudah ada niatan, kapan? *Nah*, saat yang paling bagus adalah mungkin dimulai dari 2024, ketika kita sadar bahwa ini perlu untuk itu. Ini salah satu yang bisa itu.

Kemudian yang kedua, itu ada pelabuhan di Kabupaten Kendal yang dioperasikan oleh KSOP. *Nah*, ini mungkin perlu segera untuk diantisipasi karena saya lihat di sana juga, jadi *enggak* bisa maksimal kan itu, sebetulnya itu juga letaknya cukup strategis.

Kemudian berikutnya juga ini, Pak, apa namanya, perlunya untuk bisa memberikan layanan yang cepat berbasis komputer, ya mungkin kan itu, dengan layanan masyarakat, mungkin ini juga perlu ditingkatkan untuk bisa memberikan suatu layanan, termasuk juga memberikan layanan pada apa, baik itu penumpang jasa maupun barang atau orang, Pak.

Terus saya minta agar ada KSOP *tuh* kerja sama yang bagus dengan para nelayan. Jadi masih banyak sekali apa, kapal-kapal nelayan itu kadang-kadang nyangkut ke situ. *Nah*, ini mungkin perlu ada komunikasi yang bagus antara KSOP dengan para nelayan-nelayan itu, biar bisa ada solusi yang terbaik.

Nah, saya minta juga, Pak, ini kaitannya dengan pengelolaan Pelni. Jadi Pelni di sana untuk bisa bagaimana agar, saya belum tahu apakah tarif, ya mungkin salah satu yang bisa menarik adalah tarif terhadap jasa layanan itu, agar nanti, kan sekarang jalan tol juga sudah ada, sudah dibangun, ada Pak Presiden, sudah bagus dan aksesnya juga bisa bagus gitu ya. Bagaimana agar wilayah Jawa Tengah ini bisa menjadi sentra layanan jasa angkutan kapal laut yang di beberapa wilayah, karena kalau dari Semarang itu ke Banjarmasin juga dekat, kemana-mana dekat dan wilayahnya juga dekat, baik itu yang kaitannya dengan masalah penumpang, kapal penumpang maupun kapal barang.

Nah, saya pikir hal-hal itu, Pak, yang perlu segera diantisipasi, dan harapan saya *sih* nanti kantor KSOP itu memang betul-betul menjadi skala prioritas, Pak, sudah terlalu lama di sana punya nya Pelindo, menempati, *enggak* bisa ngecat, *enggak* bisa merenovasi, *enggak* bisa menata, ini adalah hasil kunjungan kami bersama-sama ketika ke KSOP Semarang.

Saya ucapkan terima kasih sekali atas atensi Pak Dirjen terhadap pengembangan khususnya di wilayah Jawa Tengah dan saya berharap betul bahwa Pak Dirjen sekarang ini bisa nanti memberikan satu perhatian dan apresiasi yang lebih terhadap Jawa Tengah.

Terima kasih, Pak Ketua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Lanjut, Pak Fauzi.

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, SE.):

Ya, makasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Bapak Ketua, teman-teman Komisi V,
Yang saya hormati pula Bapak Dirjen Kelautan beserta jajarannya yang
maaf *ndak* bisa saya sebutkan satu per satu namanya,**

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita belajar dari selama kita ada di DPR, kemudian khususnya di Komisi V ini, saya melihat Pak Ketua, ide cerdas Pak Ketua itu menjadi usulan saya dalam bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang seringkali muncul. Misalkan beberapa teman tadi menyampaikan bahwasannya melihat paparan Pak Dirjen boleh dikatakan hampir semuanya menginginkan ini tidak final, *gitu*. Karena memang sangat kecil sekali ruang aspirasi kami itu terpenuhi di situ *gitu*, sementara ruang aspirasi ini dipayungi oleh payung hukum *gitu, gitu*. Nah, kalau memang bisa dijalankan seperti misalnya Pak Ketua ibaratnya kayak Musrenbang lah ya, tapi tidak resmi, seperti kemarin kita dengan PUPR, Dirjen ada pra pembahasan untuk tahun berikutnya *gitu*. Jadi, di situlah ruang aspirasi kami itu terpenuhi, *gitu*. Jadi kita juga, pembahasan *enggak* terlalu capek, Pak Ketua, kalau, kalau apa, itu bisa dijalankan kita belajar dari yang kemarin dan yang baru kita lakukan, *sorry* ini belum lama dengan Pak Dirjen, *gitu*. Kemudian juga teknisnya juga kita bisa bicarakan, itu yang pertama.

Yang kedua, kenapa itu juga saya usulkan? karena juga belajar dari yang kemarin misalkan 2023 ini Pak Dirjen ya minta maaf, (*suara kurang jelas*), boleh katakan aspirasi kita ini hanya judulnya saja, harapannya ada elektoral terhadap kita, bagaimana mengundang, bagaimana bicara elektoral sementara program di situ adanya di luar Dapil, sementara judulnya adalah aspirasi Anggota Dewan. Nah, apalagi tadi pagu, itupun tidak ada katanya, ini kan lucu, dimana logikanya, padahal sudah disepakati oleh Pak Menteri, ada semua Dirjen tapi pada saat kita bicara teknisnya, semuanya balik badan.

Kita ini malu, Pak, terus terang saja, kayak tukang apa menawarkan barang ke Kementerian Perhubungan itu, malu Pak, padahal yang kita tuntut sebenarnya hak kami juga, karena *enggak* mungkin jalan kegiatan kita, kalau tidak ada persetujuan dari kami. Jadi, tolonglah kita saling menghargai ini, *gitu*, termasuk saya, tidak ada kegiatan, boleh dikatakan aspirasi saya *enggak* ada di Dapil saya, sementara Pak Menteri menyampaikan ada ruang aspirasi *gitu*, tapi bukan di Dapil, bagaimana logikanya itu, sudah begitu tidak jelas juga *gitu* kalau pun di luar Dapil, *gitu*. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki, Pak, tolonglah kita saling menghargai satu sama lain, *gitu*. Kita juga tahu lah kondisi di sana seperti apa *gitu*, yang kita tuntut, yang kita minta adalah porsi kami di mana kita ada porsi untuk bagaimana menyuarkan kepentingan-kepentingan daerah, jadi itu.

Kemudian hal Padat Karya juga seperti itu, di saya kalau *enggak* salah pernah ada satu kali, Pak ya, di apa, di Dapil saya.

Kemudian yang tadi juga saya minta sama Pak Dirjen mengenai Munte Pak, tadi Munte, saya sampaikan ke Pak Dirjen, di mana Munte ini sebenarnya hasil daripada kujungan kerja Komisi V kemarin, dimana Munte ini sekarang sudah selesai tahap apa, perencanaannya sudah terpenuhi semuanya, ada perencanaan, harus ada perencanaan baru. *Nah*, karena itu kami mohon, Pak, ada anggaran untuk pembuatan perencanaan ini, Pak. Kalau tidak ada ya *enggak* bisa melakukan apa-apa ini pengembangan, Pak. Karena selama Munte itu di dipegang oleh satu orang untuk dua, satu syahbandar untuk 2 apa, apa pelabuhan, saya pikir Munte selalu akan ketinggalan, termasuk juga mungkin pelabuhan yang satu yang ada di Luwu Timur, Pak, jadi saya minta tolonglah itu. Kemudian juga apa Tanjung Ringgit, Palopo, Pak, itu juga ada anggaran yang pernah masuk tapi ditarik kembali, yang apa, ada pernah apa, tiang pancang kalau tidak salah itu, itu ditarik kembali, *nah* itu juga tolong lah, Pak, di apa, dilanjutkan, dilanjutkan Kembali, Pak.

Yang terakhir, Pak Ketua, saya ingin juga mengetahui Pak Dirjen persyaratan tol laut itu apa *sih* sehingga dia dapat atau dikatakan tol, bisa mendapatkan program tol laut itu *gitu*, apa *gitu*. Karena di saya, di Dapil saya hampir *enggak* ada padahal laut banyak *gitu*. *Nah*, saya ingin mengetahui. Terus ada kemungkinan *enggak* ada tol sungai *gitu*, *gitu*, karena sungai juga besar-besar di daerah kami *gitu*, kenapa itu tidak di, dia tidak tidak, tidak juga dimanfaatkan.

Saya pikir itu, yang terakhir titik beratnya, Pak Ketua, mudah-mudahan kita bisa saling menghargailah Pak, *gitu*, kita tidak menuntut lebih, Pak, *gitu*, saya juga, saya dan teman-teman menghargai kita di komisi, di komisi ini, di ruang komisi, di tempat-tempat tertentu sangat luar biasa *gitu*, tapi harapan kita juga sebaliknya seperti itu, Pak. Itu sekali lagi malu kita *gitu*, kalau datang ke sana *wah* semuanya balik badan *gitu*, *wah* saya *enggak* tahu apa-apa, saya *enggak* tahu, sementara disepakati di depan Pak Menteri, di depan Dirjen, semuanya *enggak* tahu, *enggak* tahu, ini apa *gitu* kayak main-main. Sementara yang kita lakukan ini dibenarkan oleh negara, dipayungi oleh hukum, tolong lah *gitu*, saya minta tolong teman-teman juga pasti keinginannya sama dengan saya.

Makasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Hamka, ada? Oke, Pak Hamka yang terakhir ya.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Makasih.

*Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan dan ada yang lebih duluan barangkali, Pak Ketua, lebih duluan Pak, Pak Aras kali ya?

KETUA RAPAT:

Ndak papa, Pak Hamka dulu.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Yang saya ingin dalami di sini adalah di mana kira-kira porsi alokasi untuk aspirasi Anggota, untuk tahun 2024, kalau memperhatikan apa yang disajikan oleh Pak Dirjen itu semua sudah diplot sehingga agak susah kita untuk menetapkan yang mana yang menjadi aspirasi dari Anggota. Karena jujur saya sampaikan bahwa, aspirasi itu seperti juga apa yang disampaikan oleh Pak Fauzi, itu dilindungi oleh Undang-Undang MD3. Tidak pernah saya melihat Pak Ketua, ada slot untuk aspirasi itu, *enggak* ada, Tahun 2024 anggarannya tadi sudah *bla-bla-bla*, kita ini sisa tunggu setuju, tanda tangan, selesai. *Enggak* ada, *enggak* ada yang bisa dilakukan.

..... :

Betul.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Oleh karena itu, perlu, apalagi menjelang, bukan menjelang lagi, ini sudah masuk tahun politik. Oleh karena itu Pimpinan, untuk pembahasan anggaran tahun 2024, kita harus meminta kepada Menteri ada slot untuk aspirasi itu, ini tidak di ada-adakan, tetapi harus ada, jangan seperti tahun 2023 kemarin, apa yang disampaikan Pak Fauzi dan kejadian pada diri beliau bahwa ada aspirasi yang diletakkan atas nama Pak Fauzi bukan di daerah pemilihannya, itu kan juga bisa temuan, bisa jadi masalah.

Ini yang ingin saya perjelas sebelum kita menetapkan anggaran tahun 2024. Bukan hanya kepada Dirjen Laut, semua Dirjen, satu kementerian, itu harus ada kesepakatan bahwa slot untuk aspirasi bukan untuk apa-apa, tetapi harus ada slot untuk aspirasi. Namanya kita pemegang hak anggaran, berhak dong untuk mengajukan kegiatan yang ada di daerah pemilihan kita masing-masing. Di Badan Anggaran, maaf, saya juga di Badan Anggaran temen-temen lain ada, ada slot yang diberikan, misalnya dana alokasi khusus untuk penugasan, itu undang-undang, Undang-Undang APBN itu, Pasal 12, setiap tahun.

Oleh karena itu, saya tidak mau melihat lagi, menerima lagi keadaan seperti begini yang sudah dipilah-pilah sampai sekecil kecilnya, kita *sih* sama menerima saja. Kalau itu yang mau dilakukan ya percuma lah kita menjadi

Anggota DPR, menjadi tukang tukang stempel aja, kira-kira begitu, Pimpinan. Ini penting, ini undang-undang, ini tugas kami, ya saya kira itu yang paling pokok.

Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah terkait anggaran 2023, walaupun Pak Dirjen juga saya sudah sampaikan tadi, ada KUPP, Taka Bonerate barangkali ada di sini atau Pak Direktur Pelabuhan, benar *enggak* informasi bahwa ada anggaran perbaikan Pelabuhan Bonerate Selayar yang awalnya 10 miliar turun 8, bahkan informasi terakhir hilang, bahkan sisa 1 miliar, ini informasi. Mohon penjelasan sejelas-jelasnya, ini Pelabuhan Taka Bonerate di Selayar, ada KUPP-nya di sini ya, Pak Dirjen, ada dari yang tangani ini ada *enggak* yang hadir di sini, KUPP-nya, ada *enggak*, Pak Dirjen, *enggak* ada ya?

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Ir. ARIF TOHA TJAHJAGAMA, DEA):**

KUPP-nya Kelas 3 Bapak, jadi...

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Oh Kelas 3, *sorry*. *Nah*, barangkali Direktur Pelabuhan *dong* yang bertanggung jawab dan tahu masalah itu, kalau tidak ada ya Direktur Pelabuhan di bawahnya Pak Dirjen.

Saya minta maaf sudah berapa kali saya nanyakan ini belum ada jawaban yang konkrit bahwa memang Taka Bonerate ini pelabuhannya akibat gempa di perbatasan Selayar dan Pulau *Restana* itu kemaren itu ada perbaikan-perbaikan, ada yang mengatakan belum ada DED-nya, ada yang mengatakan sudah ada dan sebagainya, sampai detik ini belum ada jawaban, *gitu loh*.

Oleh karena itu, saya sangat berharap bahwa semua ini harus *clear* dan lagi-lagi saya *stressing* bahwa pembahasan kita sekarang ini baru pembahasan pendahuluan dan saya tidak akan mau menyetujui apa yang akan menjadi usulan tanpa ada, tanpa adanya slot yang namanya aspirasi. Jangan kita hanya menerima saja, ini juga nanti ke, kami akan sampaikan kepada Pak Menteri ya karena ini adalah aturan main. Karena ini masih pembahasan pendahuluan, masih banyak yang perlu kita perbaiki, benahi, kalau perlu ada yang diganti.

Apa yang disampaikan di atas ini semua pemikiran-pemikiran Pak Dirjen, tentu kita juga setuju *dong* ya, tetapi harus ada juga slot di situ, misalnya ada Padat Karya. Padat Karya itu untuk apa? apa kegiatannya? ada manfaat elektoral *ndak* buat kami? kira-kira seperti itu, Pak Dirjen, Pak Direktur Pelabuhan. Saya butuh jawaban terhadap Taka Bonerate, kalau memang tidak, ya tidak lah, apa boleh buat mau diapa, jangan diambangkan. Saya dengar sudah pernah mau diapa, sudah muncul di LPSE, hilang lagi, ini mana yang bener. Ini saya harap ada jawaban hari ini supaya kita bisa sama-sama

berpikir dan melakukan yang terbaik untuk kepentingan daerah pemilihan kami dan tentu untuk seluruh Republik Indonesia.

Dan yang terakhir, saya ingin mengevaluasi nanti *output* daripada tol laut itu, ya. Saya harus minta suatu *exercise output* dari tol laut itu masih perlu *enggak* kita lanjutkan atau tidak karena itu adalah subsidi.

Saya kira demikian, Pimpinan. Mudah-mudahan ini adalah pembicaraan awal terhadap pembahasan anggaran tahun 2024.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Oke, makasih Pak Hamka.

Selanjutnya, Pak Aras.

F-PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.
Itu doa, Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

**Yang terhormat Pimpinan dan para kawan-kawan Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Dirjen Perhubungan Laut beserta seluruh jajaran
dan terutama KSOP dan KUPP di seluruh Indonesia yang sempat hadir,**

Pertama-tama, tentu kami mengapresiasi paparan yang disampaikan oleh Pak Dirjen terkait dengan Evaluasi Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja untuk Tahun 2024.

Yang pertama terkait dengan evaluasi, tentu kami sampai hari ini memang melihat bahwa *progress* ya cukup lumayan, tetapi yang terkait dengan program yang terkait dengan Anggota, aspirasi Anggota atau hal-hal yang memang menjadi prioritas bagi teman-teman, hampir sebagian besar belum terlaksana di lapangan, dan tadi juga menindaklanjuti untuk program 2023 bahwa program yang diusulkan oleh teman-teman termasuk saya kemarin, itu yang disetujui adalah berada di luar Dapil. Oleh karenanya, mohon ini menjadi perhatian, agar ini menjadi apa namanya, program juga bisa bermanfaat ke masyarakat yang dituju, agar ini menjadi perhatian dari teman-teman dari kementerian.

Yang kedua, terkait dengan anggaran tahun 2024. Kami tentu ingin bahwa seluruh usulan-usulan yang kami lakukan terutama di Dapil, karena kebetulan di Dapil saya paling banyak barangkali di lautnya ya, mulai Maros, Pangkep, Barru, Parepare, Bone, Wajo, Sinjai dan Bulukumba, hanya satu yang tidak ada, hanya Soppeng *ndak* ada lautnya, Pak. *Nah*, ini mohon menjadi perhatian agar ini, sering saya mendapat keluhan dari teman-teman KUPP bahwa mereka tidak mendapat anggaran signifikan setiap tahunnya sehingga mereka tidak bisa melaksanakan agenda-agenda yang tentu tujuannya adalah meningkatkan layanan kita kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan Garongkong ini *gimana* perkembangannya. Ini kan memiliki laut dalam dan sangat strategis di Indonesia Timur bahkan bisa menjadi pelabuhan alternatif dari Makassar dan Parepare, apalagi dengan pembangunan IKN semoga menjadi salah satu pelabuhan yang bisa difungsikan secara maksimal dan sesegera mungkin untuk melakukan Pembangunan agar ini menjadi salah satu *icon* di Sulawesi Selatan yang akan bermanfaat khususnya Sulawesi Selatan bagian Utara.

Kemudian yang terakhir *ndak* Panjang, Pak Ketua, ini yang terakhir, ini yang KUPP yang saya sebutkan tadi ada delapan kurang lebih, hanya satu, dua kayaknya yang biasa berkomunikasi dengan kami, terus terang yang saya hafal namanya cuma satu ya. Jadi mohon ditingkatkan koordinasinya agar tentu apa yang menjadi usulan, apa yang menjadi kepentingan kemanfaatan kita di masyarakat bisa terjembatani. Apalagi saya juga bersama dengan Pak Hamka berada di Badan Anggaran, saya Poksi PPP, Pak, di Badan Anggaran tentu menjadi bagian juga dalam hal memberikan kemanfaatan bagi Sulawesi Selatan. Oleh karenanya, mohon dipastikan bahwa teman-teman dari Dapil saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman Anggota DPR RI yang ada di sana. Saya Dapil II itu ada dua orang di sini, Pak, dua-duanya Aras. Jadi tinggal dibedakan yang mana Andi Iwan Aras, yang mana Muahammad Aras ya, ya, dua Aras ya, supaya bisa dibedakan Aras yang satu tanpa kumis, saya pakai kumis ya, ya jangan sampai Anggotanya oh saya usah bicara dengan Pak Aras, Pak Aras yang mana, *gitu*, perasaan saya hanya satu, dua KUPP yang bisa berkomunikasi dengan kami.

Terima kasih, barangkali itu yang saya sampaikan.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih.

Dari Anggota semua sudah selesai? Ibu Sri, ya Ibu Sri yang tutup silakan.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Ya, sedikit saja, Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Dirjen Perhubungan Laut dan seluruh jajarannya,**

Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah terkait dengan subsidi ya, penyelenggaraan angkutan tol laut yang proyeksi tahun 2024, itu sebanyak 158 trayek rencananya begitu, termasuk 35 trayek tol laut, kemudian perintis 117 dan selanjutnya non trayek. Yang ingin saya, saya tadi sempat menghitung-hitung *gitu*, Pak, anggarannya kan 1,847 T, itu saya mikir kalau itu jumlahnya 150, sama saya bagi rata saja itu setahun masing-masing 11 M, masing-masing ya, Pak, ya 11 M, itu *tuh* kalau dihitung rata, saya yakin ada yang lebih besar lagi ada yang turun, dan per bulannya paling *ndak* hampir 1 miliar untuk subsidinya itu. Yang ingin saya tanyakan pernahkah yang tahun 2023 ini juga di melakukan analisis, benar *enggak* pengeluaran itu sejumlah yang dianggarkan dari jumlah yang ada. Kemudian secara teknis seperti apa saya *enggak* ngerti juga, mohon itu juga di apa, dilakukan penghitungan, *gitu*. Kenapa demikian? karena mungkin BPK bisa melakukan itu, melakukan pemeriksaan ya, Pak, ya, tapi kita ini Anggota Dewan kan *enggak* mungkin satu persatu melihatnya. Seperti apa teknisnya untuk, *oh* itu anggarannya sekian kita berikan, bulan ini sekian dan seterusnya, hitunganya seperti apa.

Kemudian yang kedua, dari tahun 2024 juga, ini kan targetnya maupun pagu di sini sudah ada, targetnya tahun 2024 untuk jasa atau penerimaannya PNBPN. Ini jumlah targetnya totalnya 4,4 T dan asumsi maksimum pagu penggunaan, saya kurang paham ini, 2,9. Ini apakah maksudnya pengeluaran dari apa yang ini? apakah angka ini juga sudah masuk di dalam APBN? atau dikhususkan dibandingkan antara penerimaan dan pengeluaran yang hasilnya pada halaman 27, Pak, yang hasilnya itu nanti akan masuk PNBPN atau Bapak punya program sendiri? Kenapa saya sampaikan seperti ini, kalau saya lihat anggaran dari hubungan, eh Perhubungan Laut ini cukup besar ya, program infrastrukturnya saja 5,8, kemudian manajemen-nya 3,3 T bukan M tapi T triliun, ini menurut saya angka yang cukup, cukup besar.

Nah, oleh karena itu, kami mohon penjelasan ke depan, meskipun sebagaimana yang disampaikan Pak Hamka kalau pun *toh* kita menyetujui, menyetujui globalnya, tetapi isi-isinya belum kita ini semua, karena tadi kan ada permintaan dari kawan-kawan untuk slot aspirasi dari kita. Kebetulan daerah saya, Jawa Timur, Pak, saya lihat Jawa Timur juga *enggak* terlalu besar meskipun Tanjung Perak tadi kan dikatakan katanya besar juga dibandingkan Tanjung Mas ya, Pak, ya, tapi ternyata kalau dilihat juga *enggak* besar juga begitu, dan kebetulan Dapil saya tidak ada. Meskipun ada pelabuhan-pelabuhan ikan, pelabuhan *gitu* ada, tetapi tidak ada anggaran yang masuk di sini.

Saya kira itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dari Anggota semua sudah selesai.

Pak Dirjen dan seluruh jajaran,

Dari Pimpinan, saya ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, tadi hampir semua Anggota bicara tentang Padat Karya, ini catatan sangat penting Pak Dirjen agar kami juga di daerah kami, selama ini belum pernah ada Padat Karya bersama dengan teman-teman dari mitra dari Dirjen Perhubungan Laut ya, maka ini ke depan harus lebih baik, ya apa yang telah kami sampaikan bersama tadi bersama Pak Dirjen. Ini mohon ditindaklanjuti agar semua mitra bersama kami yang ada di Perhubungan Laut, Pak Dirjen dan seluruh jajaran sampai ke tingkat daerah itu bisa bekerja sama kita, bisa berkoordinasi agar semua program itu bisa berjalan bersama Pak Dirjen ya.

Yang berikut, Pak Dirjen, apa disampaikan Pak Hamka, saya kira itu yang menjadi salah satu yang selalu saya sampaikan. Saya, terima kasih Pak Hamka sudah menyampaikan itu bahwa amanat undang-undang itu yang kami terbebani adalah aspirasi yang harus kami bawa. Maka setiap kali pembahasan, saya selalu menyampaikan itu kepada mitra agar ada slot aspirasi di dalam setiap kali kami membahas anggaran. Jadi, Bapak teman-teman mitra itu kalau membuat perencanaan ada juga perencanaan bahwa ini ada slot untuk Anggota, begitu. Jangan nanti kita rombak-rombak semua ya kan kasihan teman-teman sudah rapat, sudah ini, sudah siapkan, tetapi kami Anggota punya kewajiban dan punya tanggung jawab, dan itu diamanatkan oleh undang-undang, bukan cuma kami yang minta dan itu ada undang-undangnya, dan ada undang-undang yang menyatakan bahwa ada DPR bisa mengubah APBN dengan usulan program DPR, nah, itu salah satunya maka ini menjadi perhatian untuk Pak Dirjen dan seluruh jajarannya untuk ke depan. Dan saya juga sudah sampaikan bahwa tadi bersama teman-teman Anggota Pimpinan tadi, pembahasan di Dirjen Darat, ke depan, kami akan minta untuk kami bahas lebih dalam lagi yaitu sampai ke satuan tiga dan itu adalah kami melakukan konsinyering untuk bisa, karena memasukkan program-program aspirasi di dalam perencanaan yang sudah dilakukan oleh Dirjen. Karena kalau kami bahas di sini tidak mungkin itu bisa masuk, maka kami harus membahas lebih detail lagi agar program-program itu bisa masuk semua ke dalam pembahasan kita nanti ya, itu catatan yang sudah kami lakukan tadi. Maka itu juga yang ingin saya sampaikan ke Pak Dirjen, ke depan kami akan mengubah sistem pembahasan, karena kami lebih ingin kembalikan fungsi kami, kita tahu tahun-tahun kemarin dengan alasan Covid, kami

menerima itu semua, sekarang kita kembali semua sudah normal maka pembahasan ke depan harus kembali normal seperti amanat undang-undang.

Yang berikut Saudara Dirjen, saya melihat ada beberapa hal di sini yang menurut saya ini perlu menjadi perhatian ya. Yang pertama adanya perbedaan realisasi fisik dengan keuangan pada penyelenggaraan pelayaran angkutan barang tol laut dengan mekanisme penugasan dan swasta. Ini ada menunjukkan banyak kewajiban dari Dirjen Perhubungan Laut yang belum dibayarkan pada penyedia jasa angkutan tol laut swasta dan penugasan. Saya, kita berharap pembayaran kewajiban dilakukan tepat waktu agar neraca keuangan penyedia angkutan tol laut ini tetap sehat ya, kalau melihat selisih itu maka pasti ada banyak tunggakan kalau lihat selisih yang Bapak sampaikan, maka kami minta untuk itu jadi perhatian.

Yang berikut ini Dapil kami, prioritas di daerah kami ini saya lihat ada beberapa trayek perintis ya, ada 15 trayek baru perintis di Papua yaitu ada 5 trayek Jayapura, 3 trayek di Biak dan 7 trayek di Merauke. Ya, harapan kami ke depan ya ini lebih ditingkatkan lagi, karena terutama masyarakat kami yang di daerah-daerah kepulauan banyak sekali masyarakat kami yang belum bisa merasakan mudahnya ya sembako di daerah-daerah itu ya, lima bahan pokok ini terus terang kalau bicara tertinggal, termiskin, ya ada di kami, maka pemerintah harus hadir. Pak Menteri sudah sampaikan ke saya kami akan lebih memperhatikan di daerah sana karena kami tahu ya, Pak Dirjen juga harus tahu itu, bahwa daerah kami memang sangat membutuhkan itu ya, masyarakat kami fasilitasnya terbatas, semuanya terbatas, maka pemerintah harus hadir di sana untuk memberikan dukungan-dukungan kepada masyarakat.

Yang berikut, saya kira apa yang disampaikan tadi oleh Pak Hafid ini menjadi perhatian kita. Saya melihat, tadi saya sebelum berangkat pagi saya lihat di TV ya kan, itu ada 5 juta ton nikel yang katanya ilegal keluar iya kan, keluarnya tidak mungkin lewat pesawat, ya pasti lewat pintu-pintu laut, tersus-tersus yang ada, maka itu ada di tempat kami, Pak Dirjen. Kalau sampai temuan itu benar, maka yang bertanggung jawab Saudara-Saudara yang ada di sini, yang harus bertanggung jawab, karena barang itu bisa keluar melewati tempat-tempat Saudara-Saudara ya.

Jadi, ini saya mohon perhatian kita semua, mudah-mudahan saja ini *enggak* benar, tetapi kalau melihat data yang diberikan ya sekarang baru ada penyanggahan bahwa ada yang namanya bijih besi yang itu bisa di, apakah itu bahannya yang sekarang dibidang itu nikel apa, apa? Ya kan, karena ada yang masih boleh ya kan. *Nah*, ini lagi diselidiki mudah-mudahan saja benar, maka apa yang menjadi topik sekarang cukup ini bahwa ada 5 juta ton ini tidak benar, harapan saya, tapi kalau benar ya Pak Dirjen dan jajaran harus bertanggung jawab ya, karena ini tidak mungkin dia keluar lewat udara, saya ingin sampaikan, tidak mungkin dia keluar udara, dia keluar melalui pintu laut, pasti.

Baik, yang berikut Pak Dirjen, sekali lagi saya ingin juga teman-teman terutama yang di Papua, ini saya harus sampaikan Pak Dirjen Laut. Tadi Dirjen Darat, saya udah sampaikan, kami di Papua itu dilindungi oleh satu undang-

undang diskresi Presiden *eh* negara yaitu Undang-Undang Otonomi Khusus, itu diskresi negara untuk memberikan apresiasi kepada Papua, dan itu sudah dilakukan di semua di darat ya, di Papua, Poldanya semua orang Papua, anak Papua. *Nah*, di Kementerian PUPR, Kepala Balainya semua anak-anak Papua, Perhubungan belum ya. Tadi saya sampaikan tadi di Darat ada balai di Papua sekarang yang baru karena sudah ada DOB, maka tidak lagi bersama dengan Papua Barat, Papua Barat Daya dan Papua Barat pisah, kami sendiri baru beberapa bulan ya kan, ada ya katanya anak lahir di Papua ya oke. Siapa pun yang lahir di Papua dia anak Papua, orang Jawa anak Papua *enggak* apa-apa, tapi dia lahir di sana, tanah tumpah darahnya di Papua gitu.

Saya harapkan ke depan Pak Dirjen, anak-anak Papua juga harus khususnya di Dirjen Laut, KSOP-KSOP ini juga harus bisa mengakomodir itu. Saya terus terang kemarin, tadi Dirjen darat bilang, Pak, kami akan kasih mereka belajar di luar, saya sangat setuju, biar mereka magang di luar. Kenapa harus begitu? supaya mereka merasakan memiliki negara republik ini, anak-anak Papua ada di pelosok negeri ini, bukan cuma harus di Papua ya kan, tapi berikanlah porsi yang baik ya, supaya mereka merasa memiliki negara ini, tolong. Kenapa saya harus sampaikan ini? kami jaga keutuhan bangsa ini, tugas kami itu, menjaga keutuhan bangsa ini, maka saya harus sampaikan itu sebagai wakil rakyat dari Papua ya.

Yang berikut, Pak Dirjen mungkin berapa kali saya telepon, kebetulan Ibu KSOP Sorong ada di sini ya, karena di sana ada tempat wisata yang cukup mendunia yaitu Raja Ampat, banyak orang asing datang ke sana iya, kunjungan ke sana ya. Jadi, Ibu tolong berikan pelayanan yang baik agar betul-betul daerah itu kita harapkan menjadi pintu masuk untuk wisata ke Papua ya, agar melalui Raja Ampat seluruh Papua bisa dikenal *gitu*. Jangan datang kapalnya tertahan sekian jam, saya yang ditelepon, bukan beliau yang di Papua Barat sana, karena mereka tahu saya ini Pimpinan di sini ya Pak Harvey ya, itu tempat Dapilnya Pak Harvey, tapi kami masih satu tanah Papua. Jadi saya masih bertanggung jawab juga untuk itu semua. Jadi, Ibu tolong kita berikan pelayanan yang baik untuk mengangkat wisata kita yang ada di tanah Papua untuk Papua lebih dikenal di dunia, lebih mendatangkan wisata yang banyak, agar Papua lebih berkembang dengan datangnya wisata-wisata yang banyak. Itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi Pak Dirjen dan seluruh jajaran kita sudah setengah enam sekarang...

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Izin, pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Ada tambahan sedikit.

KETUA RAPAT:

Oh, baik, Pak silakan.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Pak Dirjen, saya ingin memperjelas lagi terhadap *statement* saya tadi, kenapa saya dan seluruh Anggota DPR 575 ini meminta *slot* untuk aspirasi? karena berdasarkan Pasal 72 huruf G, Undang-Undang Nomor 17 tentang MD3, DPR bertugas menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Selama ini kita ini tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saya ambil contoh, Pak Ketua, di Komisi XI ini *form* dikeluarkan, semua aspirasi Anggota di situ. di Komisi V ini *enggak* pernah *nih*, apa yang dipaparkan oleh Pemerintah, itulah yang kita terima, mudah-mudahan ada, ada di Dapil kami itu aja. Ini-ini ada *form*, ini sampai Bappenas pun juga harus minta itu, *gitu loh*. Kenapa saya katakan demikian? karena harusnya memang ada *slot*, ada tabel ada yang disiapkan, ini langsung dari masing-masing Anggota ke kementerian langsung ke Bappenas.

Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ini, Pak Ketua coba kita harus merobah ya, merobah mekanisme ini, mumpung masih dalam pembahasan pendahuluan. Belum lagi kalau saya katakan Pasal 80 huruf J, Anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, pemilihan. Pasal itu masih bagus kalau ada diprogramkan daerah pemilihan kita, itu masuk. Kalau sama sekali daerah pemilihan kita tidak ada yang diprogramkan oleh pemerintah, ini kan persoalan, ini Komisi V, Pak, Komisi XI ini Pak Ketua, spesial, Pak. Tiap tahun di Badan Anggaran, tiap tahun, Pak. Urusan selanjutnya jangan kita berpikir yang negatif, selama kita berpikir positif dan itu untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan materi, itu harus dilakukan.

Ini, Pak Ketua, jangan kita terlalu jauh melangkah, kita tidak pernah tahu, kita menengadah saja pada layar ini, menunggu ada *enggak* daerah pemilihan saya, kalau tidak ada, apa yang terjadi, apa yang kami mau ngomongin di daerah. Kalau muncul satu, satu poin di situ *alhamdulillah* ada Papua ada Sulawesi, masih mending kalau ada, kalau tidak. Ini saya tegaskan di sini, Pak, karena memang harus, harus kita perhatikan benar-benar aturan main ini, jangan hanya kita menerima saja, langsung tanda tangan Pak Ketua, selesai, ya selesai sudah.

Saya kira itu tambahan, saya hanya memberikan dasar-dasar hukumnya, jangan ada pemisah. Saya terbuka, tidak ada untuk kepentingan pribadi, hanya untuk kepentingan masyarakat dan rakyat daerah pemilihan kita,

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Hamka.

Ya, jadi Pak Dirjen, saya kira apa yang Pak Hamka sampaikan itu yang harus ke depan kami lakukan dan Pak Hamka, saya kira catatan itu saya sudah lakukan itu Pak Hamka, 2023 semua Pimpinan sudah tanda tangan APBN-nya, saya belum, saya tidak tanda tangan Pak Hamka. Saya minta perencanaan ketemu saya dulu, 2024 seperti apa ke depan, aspirasi kita harus masuk, baru saya tanda tangan, itu yang saya lakukan. Jadi ke depan saya akan tuntutan itu, makanya saya sampaikan tadi akan berubah, kami minta ya. Jadi supaya aspirasi Anggota semuanya bisa tertampung sesuai dengan amanat undang-undang yang kita amati, yang kita pikul bersama, yang kita pertanggungjawabkan nanti pada rakyat.

Saya kira demikian, demikian Saudara-Saudara.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Pimpinan, sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Masih ada, Bu Sri?

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Ya.

Apa yang disampaikan Pak Hamka sesuai dengan undang-undang kita yang MD3, mungkin kalau ini kan hubungan laut ya Perhubungan Laut, tidak semua daerah pemilihan punya laut. *Nah*, oleh karena itu ini juga harus menjadi perhatian mungkin bisa dialihkan ke Dapil yang lain yang punya laut, tetapi kan itu namanya aspirasi itu kan tidak hanya dari Dapil, karena kita ini kan Anggota DPR RI seluruh republik *gitu*. Jadi, utamanya mungkin daerah pemilihan, tapi kita ini Anggota DPR RI, sehingga aspirasinya tentu secara nasional.

Terima kasih, Pimpinan, penegasan saja.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih Bu. Karena ditugaskan sama fraksi, jadi fraksi pun punya hak untuk memberikan program diperjuangkan di Komisi.

Demikian pendapat dan pertanyaan yang telah disampaikan oleh Anggota dan seluruh dan Pimpinan DPR RI.

Selanjutnya kami persilakan kepada Dirjen untuk memberikan tanggapan yang pokok-pokok saja, Pak Dirjen, yang lain nanti tertulis, yang penting-penting saja, silakan.

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Ir. ARIF TOHA TJAHHJAGAMA, DEA):**

Bismillahirrahmanirrahim.

**Yang terhormat Bapak Ketua Komisi V,
Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang kami muliakan,**

Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih atas evaluasi, masukan, saran, dan pertanyaan yang diajukan pada kami untuk kami bisa lebih meningkatkan pelayanan angkutan laut di negeri kita tercinta ini. Pertama, beberapa hal yang ingin kami sampaikan, kami akan menjawab secara global Bapak, nanti kemudian akan kami sampaikan secara tertulis satu demi satu.

Pertama terkait dengan efektivitas tol laut, Bapak. Jadi, kami memang sudah menjalankan tol laut ini selama sekitar 7 tahun. Jadi, apa program ini berjalan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Salah satu contoh yang mungkin dapat kami sampaikan di sini, kami bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan untuk melakukan penilaian terhadap efek dari tol laut ini, apakah memang sudah bisa tadi disampaikan memenuhi apa, mengurangi disparitas harga apabila dia menggunakan komersial. Salah satu contoh di sini kami berdasarkan data yang kami dapat dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri ya, contohnya di Natuna, itu untuk pakaian jadi bisa turun 43,75% dari ini, kalau non tol laut itu 80.000 per buah, kalau tol laut bisa 45.000 per buah. Kemudian di Anambas, baja ringan V itu bisa turun 46,15%, non tol laut itu 65.000 per meter persegi, kalau tol laut 35.000 per meter persegi. Kemudian di Halmahera Timur ini alat tulis dan peralatan kantor bisa turun 60%, kalau pakai kapal non tol laut itu ada 5.000 Rupiah per buah, kalau tol laut bisa mencapai 2.000 Rupiah per buah, ini data yang kami dapat dari Kementerian Perdagangan. Itu beberapa contoh, Bapak. Jadi, dari segi statistik dampak dari tol laut itu dirasakan di beberapa daerah dan ini akan terus berkembang, akan terus kami lanjutkan di tahun 2024.

Selanjutnya, terkait dengan IKN, Bapak. Jadi kami memang terus mendukung pembangunan IKN ini, kami sudah menerbitkan lebih dari 17 pemanfaatan garis pantai yang bisa digunakan untuk melakukan bongkar muat di seluruh wilayah IKN. Jadi barang-barang, batu apa pun material bangunan yang dari Sulawesi bisa menggunakan 17 garis pantai ini untuk melakukan bongkar muat itu, itu yang material batu, Bapak, batu dan sebagainya. Ini kami koordinasi dengan apa Balai Jalan di Kaltim, apa apabila memang memerlukan tambahan daripada pemanfaatan garis pantai ini. Jadi dengan adanya pemanfaatan garis pantai ini, tongkang-tongkang bisa langsung sandar dan melakukan kerjaan bongkar muat. Terkait baran-barang yang non material, itu kita menyediakan Pelabuhan Balikpapan sebagai tempat pembongkaran, kemudian dilakukan lokasinya ada di IKN. Jadi perlu akses yang rencananya

ada jalan tol untuk dari Balikpapan ke IKN. Beberapa pelabuhan yang di sepanjang Balikpapan itu juga terus melayani, baik itu alat-alat bongkar, alat-alat konstruksi untuk bisa mempercepat atau melancarkan pembangunan di IKN.

Hal menarik yang berikutnya adalah terkait dengan ekspor ore nikel yang memang sudah dilarang, Bapak. Jadi, kami kantor UPT wilayah kami tugasnya adalah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar di mana di situ ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh kapal sebelum berangkat, di antaranya adalah LHV atau Laporan Hasil Verifikasi. Jadi kami kerjasama dengan ESDM, Bapak yang mengeluarkan LHV sebelum kapal, pada saat pemuatan kapal di sana sudah ada surveyor yang ditunjuk oleh ESDM yaitu Sucofindo untuk ke menghitung berapa, berapa ton ore nikel yang yang diangkut sehingga kami berdasarkan laporan dari ESDM tersebut LHV-nya ada, maka kita akan berikan SPB untuk diberangkatkan.

Jadi semua berdasarkan data yang diberikan oleh ESDM di daerah di masing-masing tempat atau tempat penambangan nikel. Jadi dan terkait dengan pelabuhan-pelabuhan yang atau tersus-tersus yang melayani ini semuanya kami dorong untuk mengurus izin nya, Pak, sudah kami permudah, tetapi memang sangat apa ada beberapa hal sensitif yang memang mereka harus penuhi terutama terkait dengan izin lingkungan, Bapak, izin lingkungan yang semuanya terpusat di KLHK. Jadi akan banyak sekali akan cukup lama memakan waktu cukup lama untuk pengurusan izin daripada izin lingkungan ini.

Kemudian terkait dengan Padat Karya, *eh...*

KETUA RAPAT:

Mohon maaf, Pak Dirjen, saya potong

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Ir. ARIF TOHA TJAHJAGAMA, DEA):**

Ya.

KETUA RAPAT:

Apa ini yang disampaikan Pak Dirjen saya menjadi tanda tanya saya Pak Dirjen, artinya izin itu lengkap, tujuannya, apakah tujuannya sampai di sana di kontrol juga atau tidak?

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Ir. ARIF TOHA TJAHJAGAMA, DEA):**

Ya.

KETUA RAPAT:

Ya, takut saya iya, dia di situ tapi tidak dibawa ke sana, langsung dibawa keluar, ya kan.

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Ir. ARIF TOHA TJAHHJAGAMA, DEA):**

Ya.

KETUA RAPAT:

Jadi ini kalau melihat Pak Dirjen sampaikan itu ya, pendapat kecurigaan saya bahwa, oh iya dia lengkap di sana, keluar dari sana, tapi dia tidak ke tujuan yang di harus sampaikan di sini, bawa ke tempat smelter, tapi dia bawa langsung keluar ya, ya *gitu*, Pak.

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Ir. ARIF TOHA TJAHHJAGAMA, DEA):**

Mohon izin, Bapak, jadi SPB ini juga menyebutkan tujuannya ke mana. Jadi teman-teman semuanya sudah mengerti bahwa *ore* nikel ini tidak bisa langsung ke, ke luar tapi harus melalui smelter, dan smelter itu juga tersus Bapak, jadi semua yang tertulis di SPB itu sesuai dengan yang ada di Inapornet. Jadi kita sekarang sedang mengembangkan Inapornet untuk meng-*connect*-kan syahbandar dengan seluruh tersus yang ada, sehingga tidak ada keberangkatan kapal dari terminal-terminal yang tidak berizin, Bapak. Jadi tujuannya juga demikian, jadi semuanya sudah tertulis, sudah terdaftar di Inapornet, sehingga memang itu udah ada peraturan di dalam negeri bukan di apa luar negeri, Bapak.

KETUA RAPAT:

Jadi *ter-connect* ya waktu dia berangkat, dia masuk sana harus *ter-connect* ya.

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Ir. ARIF TOHA TJAHHJAGAMA, DEA):**

Ter-connect.

KETUA RAPAT:

Terdata ya?

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Ir. ARIF TOHA TJAHHJAGAMA, DEA):**

Terdata, Bapak.

KETUA RAPAT:

Harus sama ya.

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Ir. ARIF TOHA TJAHHJAGAMA, DEA):**

Iya.

KETUA RAPAT:

Oke, saya kira itu harus yang dilakukan.

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Ir. ARIF TOHA TJAHHJAGAMA, DEA):**

Di smelter, tetapi memang ya ini perlu terus kita tingkatkan, Bapak, jadi dari 100, ada 363 pelabuhan kita yang akan ter-*connect* dengan Inapornet pada tahun ini, Bapak. Jadi kami sudah meningkatkan pengawasan melalui Inapornet tersebut, tidak ada kapal yang berangkat dari kapal, pelabuhan yang tidak memiliki izin.

Terkait dengan Padat Karya, kami sudah melakukan di beberapa tempat termasuk di Aceh, Bapak. Jadi dulu pernah ada dua, dua pelaksanaan Padat Karya dan tapi kami minta temen-temen kembali ke melakukan Padat Karya ini dengan berkordinasi dengan para Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang terhormat. Contohnya pada beberapa waktu yang lalu ada undangan kami kepada, ini hanya contoh saja, Pak. Jadi Pak apa, kami mengundang Anggota Komisi V itu kadang-kadang memang perlu menyesuaikan waktu ketersediaan atau kalau apa, dari Bapak-Bapak yang juga memiliki kesibukan yang tidak sedikit *gitu*, Pak.

Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Bapak, Pak Hamka terkait dengan Bonerate, Bapak. Jadi yang dilelang itu adalah DED-nya, Bapak. Jadi DED-nya itu kemarin dilelangkan dan kita alokasikan senilai 2,7, memang pengurangan, tetapi juga sudah ada di DIPA kita senilai 10, Pak. Tapi dengan adanya pertimbangan waktu di tahun depan, kita anggarkan 30 ya, Pak, 30 miliar untuk Bonerate. Jadi kemungkinan Bonerate ini akan menjadi *multi years contract*, Bapak, dari 2023-2024. Setelah DED-nya selesai dikerjakan maka langsung akan kita lakukan lelang konstruksinya, Bapak. Jadi ini sudah terprogram untuk yang MYC 2023-2024, Pak.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Izin, tidak kedengaran, Pak Dirjen?

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Ir. ARIF TOHA TJAHHJAGAMA, DEA):**

Iya.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Ya, tidak terlalu saya nangkap, tadi 10 bagaimana? sudah naik jadi 30, Pak?

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Ir. ARIF TOHA TJAHHJAGAMA, DEA):**

Anggaran awal dalam DIPA 2023 teralokasi sebesar 10 miliar dengan kondisi terblokir, Bapak. Kemudian disebabkan belum dilengkapi dengan dokumen perencanaan berupa *Detail Engineering Design* atau DED. Posisi saat ini sudah studi DED pada satuan kerja kepelabuhanan dan sudah dalam tahap pembahasan, Bapak, pembahasan di laporan pendahuluan. Untuk alokasi DIPA terdapat pergeseran memang, Pak, anggaran sebesar 7,3 miliar untuk memenuhi kebutuhan keperintisan. Jadi tinggal tersisa 2,7 miliar untuk tahun ini yang digunakan sebagai pencantuman awal kegiatan 2023 sembari menunggu penyelesaian DED yang sudah dimulai dan sebagai tindak lanjut rehabilitasi pelabuhan akan dilakukan dengan skema *MYC/Multi Years Contract* 2023-2024. Untuk tahun 2024 telah dialokasikan pada pagu indikatif sebesar 30 miliar untuk kegiatan dengan rehabilitasi, Faspel Laut Bonerate. Jadi totalnya nanti adalah 32,7 Bapak, dan skema yang...

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Untuk tahun depan itu, Pak Dirjen?

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Ir. ARIF TOHA TJAHHJAGAMA, DEA):**

Bisa dimulai.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

2024 ya?

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Ir. ARIF TOHA TJAHHJAGAMA, DEA):**

2023 bisa, apabila DED sudah selesai, Bapak, bisa kita mulai misalnya di sekitar bulan Oktober, kita selesai DED, kita lelangkan untuk tahun 2023 ini dengan anggaran 2,7 miliar, kemudian ditambah dengan 2024 nanti sampai selesai itu adalah 30 miliar, Bapak. Jadi ini tetap berjalan, jadi *multi years contract*, Bapak.

INTERUPSI F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Pimpinan, Pimpinan, interupsi Pimpinan.

Jujur saja sebenarnya itu aspirasi saya *gitu*, cuma saya memang saya kasih ke Pak untuk karena tidak ada di Dapil saya, saya berikan ke Pak Hamka dibanding keluar dari Sulawesi Selatan.

KETUA RAPAT:

Bagus itu.

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Ya, karena tidak ada. *Nah*, hal-hal kayak gini harusnya saya diberi tahu *gitu* kan, karena saya berkurang, ini seharusnya kan diganti, kan begitu ya kalau bicara itu, tapi tidak ada sama sekali *gitu*, ini kan kayak main-main kita memutuskan sesuatu ini *gitu*, kayak main-main, kayak kita tingkat kelurahan *gitu*.

Makasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke, makasih.

Pak Dirjen dicepatin saja, itu jam sudah mau jam enam nanti maghrib ini ya.

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Ir. ARIF TOHA TJAHHAGAMA, DEA):**

Satu lagi yang kami ingin sampaikan, Bapak, terkait dengan kolom aspirasi, kami sejutu, Bapak. Jadi alangkah baiknya sebelum nanti ditetapkan, ada pertemuan khusus tentang aspirasi yang kembali kami untuk mendapatkan masukan, tetapi mohon izin memang semuanya harus *readiness criteria* nya sudah siap, Bapak. Jadi dokumen-dokumen perencanaan sudah siap untuk kemudian dilakukan eksekusi konstruksi sesuai dengan PNW di kami.

Itu yang dapat kami sampaikan, sekali lagi terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari apa yang sudah kami laksanakan selama ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Baik.

Demikian, Saudara-Saudara.

Apabila tidak ada hal-hal lain lagi yang perlu kami bahas, maka sesuai dengan Ketentuan Tata Tertib Pasal 283, kita akan merumuskan kesimpulan atau keputusan RDP pada hari ini. Untuk itu mari kita, buka di atas, ya saya bacakan ya kesimpulannya.

**DRAFT KESIMPULAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
RABU, 5 JULI 2023.**

1. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Komisi V DPR RI meminta Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 di mana capaian per 30 Juni 2023 sebagai berikut: Unit Organisasi Eselon I Dirjen Perhubungan Laut realisasi keuangan 41,44%, realisasi fisik 43,34%.
2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengenai rincian program dan alokasi pagu anggaran untuk Eselon I dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: Unit organisasi Eselon I Dirjen Perhubungan Laut pagu kebutuhan Tahun Anggaran 2024, 14.775.940.197.000, pagu indikatif Tahun Anggaran 2024, 9.289.464.749.000, selisih *backlog* 5 triliun 486 miliar 475 miliar, 404 *eh*, 475 juta 448 ribu Rupiah.
3. Komisi V DPR RI sepakat dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk menyesuaikan rincian program dan penyempurnaan RKA K/L Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan saran dan pendapat serta usulan Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Anggota?

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Ya?

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Kita ini jenuh juga dengan kayak gini, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kan belum setuju, cuman memahami.

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Gitu, kesimpulanya selalu poin ketiga begitu, tapi kenyataannya jauh panggang dari api *gitu*.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Perlu ada kata-kata penegasan, Pak Ketua, yang beda dengan kemarin-kemarinlah sehingga *enggak, enggak, enggak apa, enggak* hilang muka kita di Dapil *gitu*, begitu Ketua.

KETUA RAPAT:

Apa maunya? Ini baru pembicaraan pendahuluan *toh?* Jadi tidak ada terlalu yang, ini kan pendahuluan kita baru ini, nanti setelah Presiden nanti selesai, ini baru kita masuk.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Gini, Ketua, izin Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Karena ini masih sifatnya pendahuluan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Saya pikir untuk sementara benar apa yang dikatakan Pak Fauzi, ini cuma normatif semuanya. Oleh karena itu, kesempatan ini boleh kita terima, tapi pada saat kita menyimpulkan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Anggaran 2024 harus konkret di situ bahwa aspirasi Anggota atau kah saran pendapat *bla-bla*, itu teknis di situ. Nanti kita rumuskan ya kalimatnya, makasih ya.

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Oke, Pimpinan, kalau itu disetujui harus ada nota, tidak perlu masuk di sini, tapi di internal komisi.

Makasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya?

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Mungkin supaya lebih kuat sesuai dengan aspirasi, saran, pendapat, tambah aspirasi.

KETUA RAPAT:

Ya boleh, ya, koma saran, ini ya karena aspirasi sesuai dengan MD3 kan aspirasi, ya kan?

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Iya.

KETUA RAPAT:

Oke. oke ya, jadi ditambahin ya sesuai dengan aspirasi, saran dan pendapat serta usulan Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rapat rangkaian proses pembicaraan pendahuluan. Oke, Anggota, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Mohon Pak Dirjen, setuju?

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Ir. ARIF TOHA TJAHHJAGAMA, DEA):**

Setuju, Bapak.

KETUA RAPAT:

Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Saudara-Saudara yang kami hormati,

Dengan telah disepakatinya beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut, maka rangkaian acara RDP pada hari telah kita selesaikan, kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan.

Sebelum rangkaian acara rapat hari ini kami tutup, kami berikan kesempatan kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk menyampaikan kata penutup. Silakan, Pak Dirjen.

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Ir. ARIF TOHA TJAHHJAGAMA, DEA):**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi V,
Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang kami muliakan,**

Sekali lagi, kami terima kasih atas dukungan, saran dan aspirasinya yang akan kami tindaklanjuti. Kemudian kami terus memohon agar dukungan dari Komisi V untuk peningkatan pelayanan perhubungan laut khususnya, sehingga benar-benar bermanfaat bagi Masyarakat. Dan sekali lagi saya ingatkan kami komitmen dengan teman-teman dengan seluruh UPT di sini untuk memperbaiki komunikasi dengan para Anggota Komisi V yang kami muliakan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Baik.

Apabila tidak ada hal-hal lainnya...

INTERUPSI F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Pimpinan, Pimpinan sedikit interupsi.

Ini saja, saya ingin mengingatkan kami tunggu Pak Dirjen apa yang kita diskusikan di ruang makan tadi ya.

Makasih, Pak.

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Ir. ARIF TOHA TJAHJAGAMA, DEA):**

Ya, Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, baik.

Apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu kita bicarakan, maka rapat dengar pendapat pada hari ini dapat kita tutup dengan ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.05 WIB)

JAKARTA, 5 Juli 2023
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002